

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



**DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
JL. IR. H. JUANDA NO. 100 BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkah dan Rahmatnya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini memuat secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam merealisasikan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebagai salah satu upaya mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan.

Semoga keberadaan Rencana Kerja ini bermanfaat, khususnya bagi pelaksana kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi maupun masyarakat pada umumnya.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI**



Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si.
NIP. 19660301 199003 1 010

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



DAFTAR ISI

1.	KATA PENGANTAR.....	i
2.	BAB I PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum.....	3
	1.3 Hubungan antar Dokumen Perencanaan.....	3
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.5 Sistematika Penulisan.....	4
3.	BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	6
	2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	6
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	12
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
4.	BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI.....	25
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	26
	3.3 Program dan Kegiatan	27
5.	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	38
6.	BAB V PENUTUP	53

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	9
2.	Tabel 2.2 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021.....	17
3.	Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi Sebagaimana tercantum dalam SPM.....	29
4.	Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	30

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial kota Bekasi dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 disusun sebagai landasan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial tahunan dan dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2025. Renja SKPD tahun 2025 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 yang merupakan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Perubahan yang sangat cepat dalam kerangka regulasi pada lima tahun belakangan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa tanggap dalam menyesuaikan proses pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMD dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2025 Kota Bekasi diperkirakan masih

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



dihadapkan berbagai permasalahan strategis, diantaranya permasalahan Kesejahteraan Sosial.

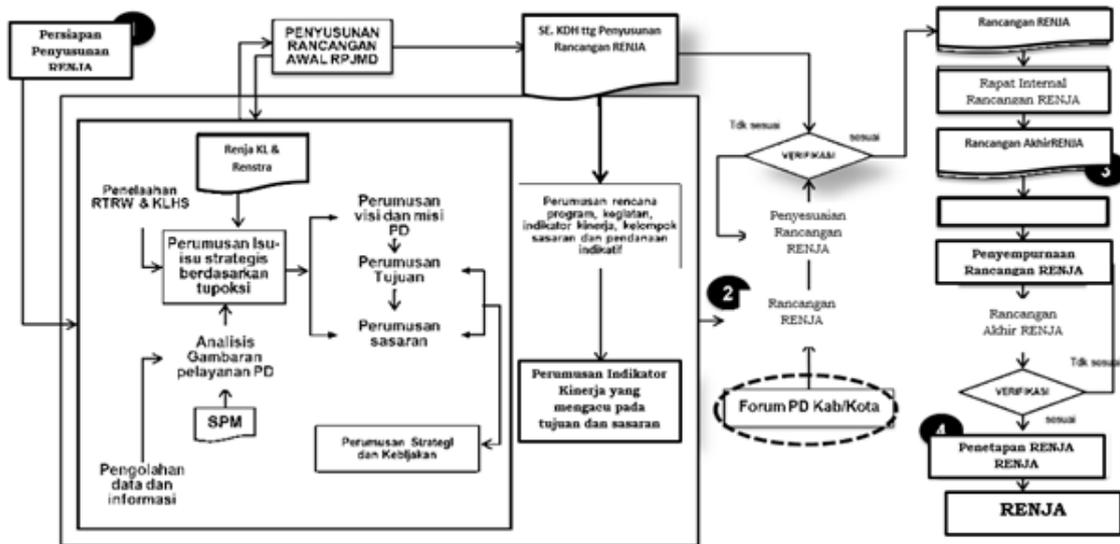
Masalah kesejahteraan sosial merupakan fenomena sosial yang sulit dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat di Kota Bekasi. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan masalah sosial adalah kemiskinan yang merupakan dampak negatif dari arus urbanisasi, sulit dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia serta terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan kaum urban.

Dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan reformulasi terhadap prioritas pembangunan yang ada untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan dan mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025, tetap mengarah pada target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja disusun dengan tahapan, Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan Penetapan, Proses penyusunan Renja Dinas Sosial sebagai Berikut :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renja



Keterkaitan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan RPJMD Kota Bekasi, Renja Dinas Sosial Kota Bekasi berpedoman pada RPD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 1(satu) tahunan :
 - a. Renja Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai dokumen teknis penjabaran RPJMD Kota Bekasi;
 - b. Renja Dinas Sosial Kota Bekasi memuat Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD yang berkoordinasi dengan DINAS SOSIAL;
2. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

3. Keterkaitan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hubungannya dengan pengembangan bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial, dalam pemberian layanan kepada PPKS, salah satunya yang terkait dengan RTRW yaitu, masih minimnya fasilitas umum untuk penyandang Disabilitas dan belum terciptanya Kota Ramah Lansia.
4. Keterkaitan Renja Dinas Sosial dengan Renja Provinsi yaitu berkesinambungan Program –Program dalam penanganan Kesejahteraan Sosial Khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Program-program yang saling berkaitan diantaranya :
 - a. Program Rehabilitasi Sosial;
 - b. Program Pemberdayaan Sosial;
 - c. Program Perlindungan dan Jaminanan Sosial;
 - d. Program Penanganan Bencana.
 - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RENJA SKPD Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025, memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Meneteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 400.9.14/Kep.598-Bappelitbangda/XII/2023. Tentang Tim Koordinasi

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial tahun 2025 dilaksanakan dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan kegiatan Dinas Sosial untuk periode tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
- b. memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2025;
- c. sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi;
- d. memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Sosial tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- b. Bab 2 (dua) menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal SKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- c. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan dan Sasaran.Dinas Sosial Kota Bekasi, Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
- d. Bab 4 (empat) Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Sosial Kota Bekasi
- e. Bab 5 (Lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Bekasi dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran Kota Bekasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ditunjang oleh Program dan Kegiatan, yang meliputi 6 Program dengan 12 Kegiatan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.132.479.236 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.416.231.841 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau 85,63%,

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Prakiraan Capaian Tahun 2025.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2024 sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Capaian Indikator Kinerja, di dukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT S/D TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2023	RELISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM / KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2025	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	100%	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	21 Dokumen	21 Dokumen	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	25 Dokumen	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	30 Laporan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



					Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%			
					Pengadaan peralatan da mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	17 Unit	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	100%	85 Unit	85 Unit	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dalam 1 (satu) Tahun	100%							
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%							

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	100%	250 orang	250 orang	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	12 Orang	12 Orang	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Keluarga	110 Keluarga	1320 Keluarga	1320 Keluarga	100%	1320 Keluarga	1320 Keluarga	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	100%	11 Lembaga	11 Lembaga	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



					Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	1500 Orang	1500 Orang	100%	1500 Orang	1500 Orang
					Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	300 Orang

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	120 Orang	120 Orang	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	300 Orang	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	450 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	400 orang	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	450 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	400 orang	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	400 orang	
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	400 orang	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase peningkatan pendayagunaan data dan informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2190 Keluarga	2190 Keluarga	2190 Keluarga	2190 Keluarga	100%	2190 Keluarga	2190 Keluarga	
				Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.232.715 Orang	1.232.715 Orang	1018733 Orang	1018733 Orang	100%	1018733 Orang	1018733 Orang	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10368 Keluarga	10368 Keluarga	10368 Keluarga	10368 Keluarga	100%	10368 Keluarga	10368 Keluarga	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						100%			
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	2000 Orang	2000 Orang	100%	2000 Orang	2000 Orang	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	300 Orang	
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	65 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	60 Orang
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		3 Kampung	3 Kampung	2 Kampung	2 Kampung	100%	2 Kampung	2 Kampung
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Peningkatan kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Area	1 Area	1 Area	1 Area	100%	1 Area	1 Area
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Area	1 Area	1 Area	1 Area	100%	1 Area	1 Area
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	246 Makam	246 Makam	246 Makam	246 Makam	100%	246 Makam	246 Makam

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2.1.2 Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Nilai	BB 80,50	BB 93,45	100% 116%
2	Meningkatnya Keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	%	5%	12%	240%
3	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	%	100%	100%	100%

Sumber Data : *Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Tahun 2024*

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Seperti telah diuraikan diatas, bahwa secara keseluruhan sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja Tahun Anggaran 2024 dapat tercapai sesuai dengan target, adapun pencapaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** memiliki 2 indikator, diantaranya :
 - a. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, pada tahun 2024 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,29** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700.1.2.1/042-LHE/ITKO.Irban UPD tanggal 4 Juli 2024
 - b. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, pada tahun 2023 memperoleh capaian 116%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **93,45** dengan interpretasi **“Baik”** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara target kinerja yang harus dicapai di tahun 2024 adalah tetap, Maka Tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial harus bisa mempertahankan dan bahkan harus bisa meningkatkan nilai IKM Dinas Sosial Kota Bekasi.
2. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 5% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 3 Program dan 4 Kegiatan.

Target dari sasaran ini sebesar 5% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 12% atau sebesar 15.216 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 12% sehingga Capaian Kinerja 240%.

3. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana unsur PSKS yang dibina Dinas Sosial Kota Bekasi dapat melaksanakan Tugas dan fungsinya secara maksimal, yang mana tugas dan fungsinya adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan atau pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS, dalam penanganan atau pelayanan dimaksud, PSKS memberikan bantuan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dibidang Kesehatan, Pendidikan, maupun pendampingan dalam pelaksanaan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam hal ini ada 2 PSKS binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang terdiri dari 136 PSM dan 12 TKSK, untuk meningkatkan keberfungsian PSKS, Dinas Sosial melakukan Pembinaan guna meningkatkan Kapasitas

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



PSKS dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi**, dengan target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 5 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan jumlah 133 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 136 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Adapun Capaian Indikator Kinerja diatas, di dukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sebagaimana daftar di bawah ini :

A. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024 terdiri dari 6 Program dan 13 Kegiatan. Diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pemberdayaan Sosial

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3. Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penanganan Bencana

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil evaluasi Kinerja Tahun 2024, semua Target pada Program dan Kegiatan telah terpenuhi/tercapai, sehingga tidak ada Program atau Kegiatan yang tidak memenuhi target.

B. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil evaluasi Kinerja Tahun 2024, semua Target pada Program dan Kegiatan telah terpenuhi/tercapai

C. Faktor-faktor, Implikasi yang timbul dan Kebijakan / Tindakan yang diambil

a. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya pada realisasi program/kegiatan

1. Keterbatasan anggaran
2. Rasionalisasi anggaran
3. Realisasi berdasarkan Laporan orang terlantar yng diterima
4. Kurangnya waktu pelaksanaan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



b. Implikasi yang timbul terhadap target kinerja hasil / keluaran

1. Perencanaan yang sudah disusun tidak berjalan sesuai yang diharapkan
2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan

c. Kebijakan/Tindakan yang harus diambil

1. Kegiatan tidak dilaksanakan semua dikarenakan keterbatasan anggaran.
2. Dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dan terukur

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial tahun 2024.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dicantumkan dalam tabel berikut :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimal	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase PPKS Binaan yang mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Anak Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Berdasarkan Tabel diatas,berikut analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Pada Sasaran ini, memiliki 2 Indikator guna mendukung capaian sasaran, diantaranya :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada indikator ini, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial dalam menjalankan Tatakelola pemerintahan daerah bidang urusan sosial dengan mempertimbangkan capaian-capaian Kinerja Dinas Sosial, dimana evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi yang dikeluarkan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, pada tahun 2024 Dinas Sosial memperoleh capaian kinerja 100%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi **BB** dengan nilai **77,29** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Sosial Kota Bekasi, Nomor 700.1.2.1/ 042- LHE/ ITKO.Irban UPD tanggal 4 Juli 2024 dengan tabel penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Hasil penilaian evalausi AKIP

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2024	
		BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	22,94
b	Pengukuran Kinerja	30	23,11
c	Pelaporan Kinerja	15	11,23
d	Evaluasi Internal	25	20,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indikator ini merupakan Tolak ukur dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya di bidang Kesejahteraan Sosial, untuk mencapai IKM Dinas Sosial melakukan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708), dimana tahun 2024 memperoleh capaian 116%, capaian kinerja ini diperoleh dengan nilai **93,45** dengan interpretasi **“Sangat Baik”** Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bekasi.

Tabel 2.5**Kategori Mutu Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 -76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).**2. Persentase PPKS binaan yang mandiri**

Pada sasaran ini, keberfungsian PPKS dimana Fungsi Sosial dari PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) binaan yang mandiri**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 5% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 3 Program dan 4 Kegiatan.

Tabel 2.6
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS binaan yang mandiri

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	persen	5	12	240

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 5 Persen, sementara realisasi mencapai 12 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah tercapai. Untuk melihat perbandingan capaian IKK Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.7****Data Capaian persentase PPKS Binaan yang Mandiri Tahun 2023 dan 2024**

No	IKK	Capaian 2023	Capaian 2024	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	240%	Naik

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian yang meningkat pada tahun 2024 dapat meningkatkan capaian kinerjanya. Sehingga sasaran strategis meningkatnya kinerja dan layanan publik di Dinas Sosial dapat dikatakan tercapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Persentase PPKS binaan yang mandiri yang meningkat di Dinas Sosial antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.8**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2022	2023
1	Persentase PPKS binaan yang mandiri	Persen	13	5

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga penjangkauan terhadap PPKS dapat terukur dan tepat sasaran;
2. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Instansi terkait;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi;
5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024;
6. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
7. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
8. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural Dinas Sosial untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur Dinas Sosial terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;
9. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, kontrak kinerja, Perjanjian Kinerja dan Surat Pernyataan Kesanggupan pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
10. Telah diterapkannya kode etik pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi;

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



11. Telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Sosial Kota Bekasi.

Pencapaian indikator Persentase PPKS binaan yang mandiri tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 2.9
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase PPKS Binaan yang Mandiri

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Persen	100	100	100
4	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PPKS Binaan yang mandiri di tahun 2024. Capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial tahun 2024 ini jika dikaitkan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase PPKS Binaan yang mandiri 2023-2024**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PPKS Binaan Yang Mandiri	
		2023	2024
Target	Persen	13	5
Realisasi	Persen	13	5

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PPKS Binaan yang mandiri pada tahun 2023 sebesar 13% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 5%,penurunan jumlah target di tahun 2024 disesuaikan atau diselaraskan dengan dokumen renstra tahun 2024-2026.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PPKS Binaan yang mandiri di Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS Binaan
yang mandiri di Dinas Sosial Kota Bekasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN			
			RENCANA		REALISASI	
			Rp	(%)	Rp	(%)
1.06.01.01 - 04	Program Rehabilitasi Sosial	4.653.328.000	4.653.328.000	100	4.259.258.784	91,53
1.06.01.01 - 04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.653.328.000	4.653.328.000	100	4.259.258.784	91,53
1.06.01.01 - 04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	885.600.000	885.600.000	100	840.658.100	94,93
1.06.01.01 - 04.2.01.02	Penyediaan Sandang	114.000.000	114.000.000	100	112.667.450	98,83
1.06.01.01 - 04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	760.000.000	760.000.000	100	645.709.680	84,96
1.06.01.01 - 04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	427.500.000	427.500.000	100	332.066.452	77,68
1.06.01.01 - 04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	212.600.000	212.600.000	100	192.873.000	90,72
1.06.01.01 - 04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.870.000.000	1.870.000.000	100	1.802.980.302	96,42
1.06.01.01 - 04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	55.800.000	55.800.000	100	55.362.300	99,22
1.06.01.01 - 04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	242.828.000	242.828.000	100	193.482.000	79,68
1.06.01.01 - 04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	85.000.000	85.000.000	100	83.459.500	98,19
1.06.01.01 - 06	Program Penanganan Bencana	2.115.138.234	2.115.138.234	100	2.017.475.720	95,38
1.06.01.01 - 06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.782.638.234	1.782.638.234	100	1.697.259.720	95,21
1.06.01.01 - 06.2.01.01	Penyediaan Makanan	1.236.096.350	1.236.096.350	100	1.191.147.020	96,36
1.06.01.01 - 06.2.01.02	Penyediaan Sandang	237.500.000	237.500.000	100	226.210.000	95,25
1.06.01.01 - 06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	95.000.000	95.000.000	100	77.738.600	81,83
1.06.01.01 - 06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	124.041.884	124.041.884	100	122.355.000	98,64
1.06.01.01 - 06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	90.000.000	90.000.000	100	79.809.100	88,68
1.06.01.01 - 06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	332.500.000	332.500.000	100	320.216.000	96,31
1.06.01.01 - 06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	190.000.000	190.000.000	100	184.887.000	97,31
1.06.01.01 - 06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	142.500.000	142.500.000	100	135.329.000	94,97
1.06.01.01 - 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.835.840.062	2.835.840.062	100	2.639.174.475	93,06
1.06.01.01 - 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.835.840.062	2.835.840.062	100	2.639.174.475	93,06
1.06.01.01 - 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.835.840.062	2.835.840.062	100	2.639.174.475	93,06
TOTAL		9.604.306.296	9.604.306.296	100	8.915.908.979	92,83

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PPKS binaan yang mandiri, dimana pagu anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Pada Tahun 2024 sebesar Rp. **31.132.479.236.-** (*Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. **27.935.447.177.-** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), atau **89,73%**, sedangkan Anggaran untuk Penanganan PPKS Binaan yang Mandiri sebesar Rp. **9.604.306.296.-** (*Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

1. Program Rehabilitasi Sosial

a. Persentase Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti

Indikator Program ini merupakan Indikator pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib yang di emban Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan target 100% khususnya PPKS Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis, untuk memenuhi Indikator tersebut, didukung oleh Kegiatan :

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah PPKS jalanan yang dibina, pembinaan terhadap PPKS jalanan khususnya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Bekasi, dengan melakukan penjarangan-penjarangan dijalan, kegiatan ini bersinergi dengan Satpol PP serta Instansi Vertikal lainnya jika dibutuhkan, seperti, Kepolisian, Babinsa, dll. Dinas Sosial mendampingi dan membina

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



hasil Penjaringan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Bekasi, melakukan assesment kemudian mengambil tindakan atas assesment tersebut untuk dilakukan pembinaan atau pemulangan / dikembalikan ke keluarga, Target pembinaan khususnya Gelandangan dan Pengemis pada indikator ini sebanyak 670 Orang, dan telah tercapai sebesar 100%.

b. Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti

Indikator ini didukung oleh kegiatan

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Capaian pada kegiatan ini telah tercapai 100% atau 1.128 penyandang disabilitas yang menerima layanan, layanan yang diberikan diantaranya, Layanan Data dan Pengaduan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan

c. Persentase Anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti

Indikator ini didukung oleh kegiatan:

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Capaian pada kegiatan ini telah tercapai 100% atau 1.152 anak yang menerima layanan kesejahteraan sosial, dengan layanan sama seperti indikator-indikator sebelumnya, yaitu, Layanan Data dan Pengaduan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan

d. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapat rehabilitasi dasar di Luar Panti

Indikator ini didukung oleh kegiatan:

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Capaian pada kegiatan ini telah tercapai 100% atau 370 Lanjut usia, Jenis layanan yang diberikan sama dengan ketiga Indikator diatas, yaitu, Layanan Data dan Pengaduan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2. Program Penanganan Bencana

a. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Sama seperti Program Rehabilitasi Sosial, Indikator Program ini merupakan Indikator pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib yang di emban Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan target 100%, dan untuk capaian tahun 2024 telah dicapai 100% atau 2.000 Korban Bencana, Baik Bencana Alam dan Bencana Sosial

Tabel 2.12
Jumlah Korban Bencana Tahun 2024

No	Kejadian	Jumlah Korban		Ket
		Kepala Keluarga	Jiwa	
1.	Bencana Banjir	246	983	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.	Bencana Longsor	0	0	
3.	Bencana Puting Beliung	0	0	
4	Bencana Sosial		1.017	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah			2.000	

Jenis Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berupa, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Indikator ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase PPKS binaan yang mandiri adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran.
2. Melakukan Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator;

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Persentase PSKS yang berfungsi

pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana PSKS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi, PSKS di Kota Bekasi diantaranya :

1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
3. PEKSOS Sakti.
4. Koordinator PKH
5. Yayasan/Panti yang dikelola Masyarakat.
6. Karang Taruna, dll.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dalam Hal pencapaian indikator **Persentase PSKS yang berfungsi**, di tahun 2024, Dinas Sosial bersinergi secara langsung dengan PSKS, dimana tugas Pokok dan fungsi PSKS adalah **Melakukan Pendampingan Terhadap PPKS dalam mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial**.

Dinas Sosial dalam mewujudkan Keberfungsian PSKS melakukan Pembinaan dan Pelatihan terhadap PSKS

dimana Keberfungsian PSKS dilihat dari Jumlah PPKS yang diberikan pendampingan dalam mendapatkan jenis-jenis pelayanan kesejahteraan sosial, Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang berfungsi**, dengan Target di Tahun Anggaran 2024 sebesar 100% , Indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan.

Tabel 2.13
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang berfungsi

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase PSKS yang berfungsi	persen	100	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 100 Persen, realisasi mencapai 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah tercapai. Untuk melihat perbandingan capaian Persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.14****Data Capaian persentase PSKS yang berfungsi Tahun 2023 dan 2024**

No	IKK	Capaian 2023	Capaian 2024	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	Tetap

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian tetap pada tahun 2024

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Dengan Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Persentase PSKS yang berfungsi	Persen	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1. Peran Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Bekasi dalam memberikan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Kota Bekasi Khususnya PPKS Kota Bekasi;
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PSKS dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya.
3. Terjalannya Kerjasama dengan Panti atau Yayasan-yayasan di Kota Bekasi dalam penanganan PPKS;
4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Corporate Social Responsibility (CSR) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga.
5. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan PSKS;
6. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Tupoksi PSKS, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;

Pencapaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 2.16
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Prosentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berfungsi	Persen	100	100	100

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di tahun 2024. Capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial tahun 2023 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi Target Akhir Renstra 2023-2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PSKS Yang Berfungsi	
		2023	2024
Target	Persen	100	100
Realisasi	Persen	100	100

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PSKS yang berfungsi pada tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 100%, maka Dinas Sosial Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Sosial untuk meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.18
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	PSKS yang berfungsi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 4.495.500.000	Rp. 4.103.700.625	91.28	100	8.72
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.495.500.000	Rp. 4.103.700.625	91.28	100	8.72
		Peningkatan Kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 807.500.000	Rp. 738.208.000	91.42		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 162.000.000	Rp. 156.858.000	96.83		
		Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp. 97.250.625	97.25		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 3.371.163.000	Rp. 3.111.384.000	90.82		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang berfungsi, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **4.495.500.000,-** (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



sebesar Rp. **4.103.700.625,-** (*Empat Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase PPKS binaan yang mandiri mencapai 91,28 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian Kinerja sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen,.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi PD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan PD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPD, Dinas Sosial Kota Bekasi senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi, khususnya pada kinerja pelayanan Kesejahteraan Sosial selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas perbatasan Kota Bekasi.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya mekanisme (SOP) atau pedoman dan sistem untuk pengendalian.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan sosial Kota Bekasi.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas Sosial Kota Bekasi selama ini masih difokuskan hanya sebatas realisasi kegiatan fisik dan anggaran.
4. Belum lengkapnya data dan informasi PPKS.
Data dan informasi PPKS yang menggambarkan beberapa jenis PPKS yang ada di Kota Bekasi belum tersedia lengkap.
5. Belum optimalnya pemanfaatan dan analisis data PPKS untuk perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
6. Masih terbatasnya aparatur Dinas Sosial yang memiliki kompetensi dan berlatar belakang Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran serta tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial kota Bekasi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial

1. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pelayanan Dasar dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diantaranya :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di **luar** Panti

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di **luar** panti
 - Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah **Kab/Kota**
- b. Menurunkan Angka Kemiskinan Kota Bekasi.
- c. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya:
- Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
 - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Sakti Peksos Kota Bekasi
 - Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat.
- b. Meningkatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Bekasi.
- c. Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.
3. Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Cakupan Area Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggaraan Tugas dan Fungsi :

1. Keterbatasan Anggaran sehingga belum optimalnya pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi
2. Masih belum optimalnya penyediaan sumberdaya baik prasarana dan sarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial.
3. Belum tersedianya tenaga fungsional Kesejahteraan Sosial.
4. Belum terjalinnya jejaring kerjasama dengan Stakeholder tertentu dalam pembentukan Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Belum Lengkapnya Data dan Informasi PPKS.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025-2029 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi serta Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPJMD 2025 - 2029. Sebagai perangkat daerah yang menunjang urusan dan pelayanan pemerintahan, maka Dinas Sosial juga mengemban tugas untuk mendukung pelaksanaan misi-misi pembangunan daerah Kota Bekasi lainnya. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Sosial juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, dengan permasalahan dan hambatan tersebut berdampak terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran kepala daerah, terhadap capaian program, seperti :

1. Tidak terlaksananya program dan kegiatan karna keterbatasan anggaran, sehingga capaian program dan kegiatan tidak tercapai.
2. Kurang optimalnya kegiatan yang dilakukan karna minimnya sumber daya yang dimiliki

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dimiliki, Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki peluang dalam pelaksanaan kinerja, diantaranya :

1. Letak Geografis Kota Bekasi Menjadikan Dinas Sosial Kota Bekasi lebih cermat dalam menyikapi urbanisasi dimana kemungkinan akan timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Visi - Misi pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 secara langsung terkait dengan Tupoksi dari Dinas Sosial Kota Bekasi.
3. Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS), menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Bekasi menentukan Jenis-jenis PPKS yang ada di Kota Bekasi.
4. Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi tantangan yang harus komprehensif bagi Dinas Sosial Kota Bekasi, untuk menjadikan suatu perusahaan, lembaga atau yayasan menjadi CSR Dinas Sosial Kota Bekasi.

Peluang bagi Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi berdasarkan tantangan yang ada, sebagai berikut:

1. Terjalin Koordinasi dan Penyelarasan Program dan Kegiatan yang terintegrasi antar Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain pada umumnya dan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta pada khususnya.
2. Program/kegiatan terkait dengan Kesejahteraan Sosial demi meningkatkan pelayanan terhadap PPKS dapat dimasukkan ke dalam program prioritas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
3. Ketersediaan Data Terpadu PPKS yang menjadi dasar dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



4. Terjalin Kerjasama dengan Perusahaan, lembaga atau yayasan dalam mengembangkan serta meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan pembentukan CSR.

dari Isu Strategis diatas, berikut beberapa Kriteria yang dapat terjadi apabila tidak menindaklanjuti isu strategis tersebut, diantaranya :

1. Dampaknya Signifikan bagi Dinas Sosial Kota Bekasi.
2. Tidak tercapainya Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi.
3. Apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
4. Tidak Tercapainya pemenuhan target SPM.

Berdasarkan dampak yang timbul,

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Proses yang dilakukan dalam review rancangan awal RKPD yaitu dengan membanding antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dimana rancangan awal RKPD merupakan representasi dari Renstra Dinas Sosial yang kemudian diturunkan kedalam RENJA tahun 2025, proses review dilakukan untuk memastikan pencapaian target Renstra dan mengatasi isu-isu strategis Dinas Sosial dengan menganalisa kebutuhan akan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan proses yang dilakukan dalam review rancangan awal RKPD, bahwa perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan, didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Program-Program dan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial;
2. Hasil Analisis kebutuhan merupakan representasi dari Renstra Dinas Sosial dalam mencapai Target Renstra;
3. Adapun untuk Perubahan Pagu, Indikator atau yang lainnya, akan dilakukan dalam Desk Renja Program dan Kegiatan dengan perangkat daerah terkait;

Berdasarkan temuan-temuan dalam perbandingan review rancangan awal RKPD, berikut hasil review Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.19
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pemberdayaan Sosial	I	Persentase PPKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dalam 1 (satu) Tahun	42%	6.750	Program Pemberdayaan Sosial	I	Persentase PPKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dalam 1 (satu) Tahun	42%	6.750	
		II	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional	1 Area	600		II	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional	1 Area	600	
		III	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	285 Lembaga	800		III	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	285 Lembaga	800	
1	Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Bekasi (Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT Kota Bekasi)	1	Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Bekasi	1 Sekretariat	2.850	Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Bekasi (Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT Kota Bekasi)	1	Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Bekasi	1 Sekretariat	2.850	
2	Sosialisasi Pemberian rekomendasi pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	2	Tersampainya Informasi Tatacara Pengumpulan uang dan barang (PUB)	10 Perusahaan	100	Sosialisasi Pemberian rekomendasi pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	2	Tersampainya Informasi Tatacara Pengumpulan uang dan barang (PUB)	10 Perusahaan	100	
3	Pembinaan dan kerjasama bagi TKSK dan PSM	3	Terbinanya PSM dan TKSK Kota Bekasi	150 Orang	1.800	Pembinaan dan kerjasama bagi TKSK dan PSM	3	Terbinanya PSM dan TKSK Kota Bekasi	150 Orang	1.800	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



4	Penyelenggaraan Potensi Program Keluarga Harapan Bagi Sekretariat Pendampingan PKH	4	Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan di kota Bekasi	100 Orang dan 42.000 KPM	2.000	Penyelenggaraan Potensi Program Keluarga Harapan Bagi Sekretariat Pendampingan PKH	4	Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan di kota Bekasi	100 Orang dan 42.000 KPM	2.000
5	Pembinaan Karang Taruna	5	Terbinanya Karang Taruna Kota Bekasi	12 Kecamatan	500	Pembinaan Karang Taruna	5	Terbinanya Karang Taruna Kota Bekasi	12 Kecamatan	500
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa Kota Bekasi	6	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa	1 Area	600	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa Kota Bekasi	6	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa	1 Area	600
7	Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan di Kota Bekasi	7	Terbinanya dan terpilihnya Orsos/Yayasan Terbaik di Kota Bekasi	6 Lembaga	300	Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan di Kota Bekasi	7	Terbinanya dan terpilihnya Orsos/Yayasan Terbaik di Kota Bekasi	6 Lembaga	300
II	Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PPKS yang ditangani oleh pemerintah dalam 1 (satu) Tahun	11%	13.200	Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PPKS yang ditangani oleh pemerintah dalam 1 (satu) Tahun	11%	13.200
		2	persentase PPKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	39%			2	persentase PPKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	39%	
1	Penanganan PPKS Jalanan	1	Tertanganinya PPKS Jalanan	150 orang	500	Penanganan PPKS Jalanan	1	Tertanganinya PPKS Jalanan	150 orang	500
2	Pelayanan Pemakaman dan Pemulangan Bagi Orang Terlantar Dalam/Ataupun Luar Panti	2	Terlayaninya Orang Terlantar dan Orang Terlantar yang meninggal Dunia di Kota Bekasi	250 Orang	200	Pelayanan Pemakaman dan Pemulangan Bagi Orang Terlantar Dalam/Ataupun Luar Panti	2	Terlayaninya Orang Terlantar dan Orang Terlantar yang meninggal Dunia di Kota Bekasi	250 Orang	200
3	Pemberian Bantuan UEP Perorangan Bagi PPKS	3	Terbantunya PPKS dalam pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	25 Orang	500	Pemberian Bantuan UEP Perorangan Bagi PPKS	3	Terbantunya PPKS dalam pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	25 Orang	500
4	Penyelenggaraan HKSN Kota Bekasi	4	Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi	1 Event	300	Penyelenggaraan HKSN Kota Bekasi	4	Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi	1 Event	300
5	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah PPKS	5	Tersusunnya Naskah Akadenis PERDA PPKS	1 Naskah	500	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah PPKS	5	Tersusunnya Naskah Akadenis PERDA PPKS	1 Naskah	500

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



6	Pengadaan Sarana Pendukung Shelter Terpadu Kota Bekasi	6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Shelter/Panti Terpadu Kota Bekasi	1 Gedung	5.000	Pengadaan Sarana Pendukung Shelter Terpadu Kota Bekasi	6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Shelter/Panti Terpadu Kota Bekasi	1 Gedung	5.000
7	Penyelenggaraan Rumah Singgah	7	Tersedianya Rumah Singgah untuk PPKS terlantar yang memerlukan penanganan khusus	1 Unit	500	Penyelenggaraan Rumah Singgah	7	Tersedianya Rumah Singgah untuk PPKS terlantar yang memerlukan penanganan khusus	1 Unit	500
8	Pelatihan bagi PPKS	8	Meningkatnya Keterampilan PPKS	50 Orang	1.000	Pelatihan bagi PPKS	8	Meningkatnya Keterampilan PPKS	50 Orang	1.000
9	Sosialisasi Pengadopsian Anak	9	Tersampainya Informasi Tatacara Adopsi Anak	20 Orang	200	Sosialisasi Pengadopsian Anak	9	Tersampainya Informasi Tatacara Adopsi Anak	20 Orang	200
10	Penyelenggaraan HIPENCA Tingkat Kota Bekasi	10	Terselenggaranya HIPENCA Tingkat Kota Bekasi	1 Event	1.500	Penyelenggaraan HIPENCA Tingkat Kota Bekasi	10	Terselenggaranya HIPENCA Tingkat Kota Bekasi	1 Event	1.500
11	Pembentukan Dan Penguatan Bahtera Lansia di Kota Bekasi	11	Terbentuknya Bahtera Lansia Kota Bekasi	100 Lansia	500	Pembentukan Dan Penguatan Bahtera Lansia di Kota Bekasi	11	Terbentuknya Bahtera Lansia Kota Bekasi	100 Lansia	500
12	Penyelenggaraan Kerjasama dengan panti sosial dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial	12	Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Dasar PPKS di Luar Panti	25 Yayasan	1.500	Penyelenggaraan Kerjasama dengan panti sosial dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial	12	Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Dasar PPKS di Luar Panti	25 Yayasan	1.500
13	Pelayanan Day Care dan Home Care bagi PPKS Luar Panti	13	Terbantunya PPKS yang membutuhkan penangan Khusus	100 Orang	500	Pelayanan Day Care dan Home Care bagi PPKS Luar Panti	13	Terbantunya PPKS yang membutuhkan penangan Khusus	100 Orang	500
14	Pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Luar Panti	14	Terpenuhinya sebagian Kebutuhan dasar Lansia diluar panti	100 Lansia	500	Pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Luar Panti	14	Terpenuhinya sebagian Kebutuhan dasar Lansia diluar panti	100 Lansia	500
III	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Tersedianya data dan informasi PPKS	2 Dokumen	5.600	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Tersedianya data dan informasi PPKS	2 Dokumen	5.600
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	
1	Validasi Data, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem database	1	Tersedianya Data PPKS Kota Bekasi	2 Dokumen	2.000	Validasi Data, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem database	1	Tersedianya Data PPKS Kota Bekasi	2 Dokumen	2.000

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



	penanggulangan kemiskinan					penanggulangan kemiskinan				
2	Penyelenggaraan dan Pengendalian Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Bekasi	2	Terfasilitasinya Program BPNT di Kota Bekasi	200 Orang	1.000	Penyelenggaraan dan Pengendalian Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Bekasi	2	Terfasilitasinya Program BPNT di Kota Bekasi	200 Orang	1.000
3	Pembinaan dan Bimbingan Sosial Bagi KUBE	3	Terbina dan Terbentuknya KUBE di Kota Bekasi	20 KUBE	250	Pembinaan dan Bimbingan Sosial Bagi KUBE	3	Terbina dan Terbentuknya KUBE di Kota Bekasi	20 KUBE	250
4	Bantuan Penguatan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Sosial	4	Terbantunya Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Sosial	20 UEP	350	Bantuan Penguatan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Sosial	4	Terbantunya Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Sosial	20 UEP	350
5	Pelatihan dan Ketrampilan bagi Keluarga Miskin	5	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan bagi keluarga miskin dalam berusaha	10 Keluarga Miskin	350	Pelatihan dan Ketrampilan bagi Keluarga Miskin	5	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan bagi keluarga miskin dalam berusaha	10 Keluarga Miskin	350
6	Pemberian Bantuan Stimulan Modal Usaha Bagi Masyarakat Miskin	6	Terbantunya Masyarakat Miskin dalam berusaha	20 Orang	400	Pemberian Bantuan Stimulan Modal Usaha Bagi Masyarakat Miskin	6	Terbantunya Masyarakat Miskin dalam berusaha	20 Orang	400
7	Pengadaan Logistik Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	7	Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Pangan Korban Bencana	1 Paket	300	Pengadaan Logistik Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	7	Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Pangan Korban Bencana	1 Paket	300
8	Tagana Masuk Sekolah (Tagana Go To School)	8	Terselenggaranya Pendidikan/Pengetahuan Kebencanaan di Sekolah-sekolah	10 Sekolah	250	Tagana Masuk Sekolah (Tagana Go To School)	8	Terselenggaranya Pendidikan/Pengetahuan Kebencanaan di Sekolah-sekolah	10 Sekolah	250
9	Pembinaan dan pemantapan TAGANA Kota Bekasi	9	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan TAGANA dalam penanganan dan Pasca Bencana	50 Anggota TAGANA	700	Pembinaan dan pemantapan TAGANA Kota Bekasi	9	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan TAGANA dalam penanganan dan Pasca Bencana	50 Anggota TAGANA	700
BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4100

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tersedianya jasa komunikasi dan jasa komunikasi listrik	3 Line	150	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tersedianya jasa komunikasi dan jasa komunikasi listrik	3 Line	150
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2	Tersedianya jasa kebersihan dan sarana prasarana kebersihan kantor	3 orang, 1 Paket	150	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2	Tersedianya jasa kebersihan dan sarana prasarana kebersihan kantor	3 orang, 1 Paket	150
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	150	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	150
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	Tersedianya brang cetakan dan penggandaan	1 Paket	120	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	Tersedianya brang cetakan dan penggandaan	1 Paket	120
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	Terdeianya komponen Instalasi Listrik	1 Paket	20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	Terdeianya komponen Instalasi Listrik	1 Paket	20
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000 Eksemplar	40	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000 Eksemplar	40
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	7	Tersedianya Makan Minum Kantor	321 box Makanan, 907 Dus Snack, 400 Galon	50	Penyediaan Makanan dan Minuman	7	Tersedianya Makan Minum Kantor	321 box Makanan, 907 Dus Snack, 400 Galon	50
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	8	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	650 OK	250	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	8	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	650 OK	250
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	9	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi perkantoran	744 Orang/ Bulan (62 Orang x 12	3000	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	9	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi perkantoran	744 Orang/ Bulan (62 Orang x 12	3000
10	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	10	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	25 Spot/Tayang	150	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	10	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	25 Spot/Tayang	150
11	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	11	Terlaksananya Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	30 Yayasan	20	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	11	Terlaksananya Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	30 Yayasan	20

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	570	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	570
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung	200	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung	200
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	15 Kali	70	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	15 Kali	70
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional		300	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional		300
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	500	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	500
1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	1	Tersedianya Pakaian Olahraga untuk aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	120 Stell	200	Pengadaan Pakaian Olah Raga	1	Tersedianya Pakaian Olahraga untuk aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	120 Stell	200
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	2	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	120 Stell	150	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	2	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	120 Stell	150
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	3	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya untuk aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	120 Stell	150	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	3	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya untuk aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi	120 Stell	150
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	35	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	35
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	8 Orang	35	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal	8 Orang	35
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	60	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	60

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	30	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	2	Tersusunnya Dokumen Keuangan	2 Dokumen	30	Penyusunan Pelaporan Keuangan	2	Tersusunnya Dokumen Keuangan	2 Dokumen	30	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bekasi.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Dinas Sosial yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, belum ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Sosial Kota Bekasi. Namun demikian, Dinas Sosial Kota Bekasi telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang sasaran kegiatannya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



TABEL 2.20
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	CATATAN
I	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti		
i	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti		
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	451.000.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	1.200.000.000	
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	122.000.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000	
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	
11	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
ii	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi		
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
II	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial		
i	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	1.513.950.000	
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	190.950.000	
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	223.000.000	
ii	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Relawan TAGANA yang diberikan Pembinaan	450.000.000	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi yang dipilih Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Kota Bekasi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- c. Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah:

Strategi 1: Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Dasar dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diantaranya :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Terlantar di **luar** panti

- Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di **luar** panti
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di **luar** Panti
- Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di **luar** panti
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah **Kab/Kota**

b. Menurunkan Angka Kemiskinan Kota Bekasi.

c. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Strategi 2: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

a. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya :

- Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
- Sakti Peksos Kota Bekasi
- Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat.

b. Meningkatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Bekasi.

c. Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Strategi 3: Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Cakupan Area Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Program / Kegiatan Nasional bidang kesejahteraan sosial 2025 sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Keseluruhan Program merupakan Keselarasan prioritas pembangunan nasional, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam rangka ikut serta mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025 - 2029 maka tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Sosial sebagai berikut:

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	terwujudnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PPKS yang terlayani	meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial
		persentase PSKS yang berfungsi	meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	persentase PSKS yang dibina
2	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	indeks pelayanan publik	meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kota Bekasi, maka Dinas Sosial menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan yang berlandaskan program prioritas dimaksud, khususnya untuk Belanja Langsung Urusan Tahun Anggaran 2025, adapun Kebutuhan Program dan Kegiatan itu meliputi Belanja Langsung Penunjang urusan (BLPU) sebanyak **1** Program dan **7** Kegiatan sedangkan untuk Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak **5** Program dan **8** Kegiatan, dalam menjalankan program dan kegiatan dimaksud, Dinas sosial Menggunakan **Potensi ekonomi daerah**, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPKAD Kota Bekasi menjadi Pagu anggaran Kegiatan dalam pencapaian Tujuan dan sasaran kepala daerah.

Tabel Rencana Program dan kegiatan sebagai berikut (terlampir) :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 3.2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.727.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.727.000	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.295.981.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.570.387.000	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	9.245.981.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1036 Orang/Bulan	10.565.637.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	4.750.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			53.900.000	
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77 Paket	53.900.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah			885.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			620.988.250	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	195.988.250	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25	25.000.000	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30.000.000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	80.000.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	100.000.000	
v	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000.000.000	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.250.000	
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	500.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	100.000.000	
16	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	500.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	53.250.000	
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.459.465.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.741.089.586	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	175.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	468.000.000	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	2.279.465.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.273.089.586	
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			675.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.004.079.000	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	230.080.000	
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	150.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	249.769.000	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	124.230.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	4.166.240.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	3.341.258.639	
viii	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	100.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1	100.000.000	
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	100.000.000	
ix	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.066.240.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.066.240.000	
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	616 orang	500.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	616 orang	500.000.000	
26	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	500.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	500.000.000	
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110	1.000.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110	1.000.000.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



28	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	376	2.066.240.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	376	2.066.240.000
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100%	13.750.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100%	13.750.000.000
x	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		6000 Orang	8.300.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		6000 Orang	8.300.000.000
29	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1.200.000.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	1.200.000.000
30	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	350.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	350.000.000
31	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	1.600.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	1.600.000.000
32	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350	600.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350	600.000.000

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



33	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	600.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	600.000.000
34	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	1.400.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	1.400.000.000
35	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	200.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	200.000.000
36	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000
37	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	250.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	250.000.000
38	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	550.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450	550.000.000

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



39	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	350.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	350.000.000
40	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	200.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	200.000.000
xi	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100%	5.450.000.000	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100%	5.450.000.000
41	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	250.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	250.000.000
42	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	550.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	550.000.000
43	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	300.000.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	300.000.000
44	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	350.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	350.000.000
45	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.600.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.600.000.000

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



46	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	200.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	200.000.000
47	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	200.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	200.000.000
48	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	200.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	200.000.000
49	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	1.000.000.000
50	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000
51	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000
52	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	200.000.000

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100%	2.325.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100%	2.325.000.000
xii	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			90 Orang	225.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			90 Orang	225.000.000
53	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	75.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	75.000.000
54	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	75.000.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	75.000.000
55	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	75.000.000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	75.000.000
xiii	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.100.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.100.000.000
56	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	PBI : 400.000 Orang, Data LKM : 20.000 KPM PKH : 45.000, BPNT : 60.000 Kube e-warung : 60 Warung	800.000.000
57	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.232.715 org	600.000.000	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.232.715 org	600.000.000

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



58	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	700.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	700.000.000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100%	3.400.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100%	3.400.000.000	
xiv	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			2.150.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			2.150.000.000	
59	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	750.000.000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	750.000.000	
60	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350.000.000	
61	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6	350.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6	350.000.000	
62	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400.000.000	
63	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	300.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	300.000.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



xv	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100%	1.250.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100%	1.250.000.000	
64	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	400.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	400.000.000	
65	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	850.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	850.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1 Area	1.450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1 Area	1.450.000.000	
xvi	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1 Area	1.450.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1 Area	1.450.000.000	
66	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	300.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	300.000.000	
67	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	248	700.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	248	700.000.000	
68	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	450.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	450.000.000	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dari tabel diatas, Dinas Sosial Memiliki **6** Program, **15** Kegiatan dan **54** Sub Kegiatan dengan Pagu sebesar **Rp. 29.226.552.145,-** (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Dari Program dan Kegiatan yang direncanakan di tahun 2025, keseluruhannya dilaksanakan di Wilayah Kota Bekasi, yang terdiri dari 12 Kecamatan dan Kelurahan yang menyesuaikan kebutuhan dan Laporan dari masyarakat mengenai penanganan kesejahteraan sosial.

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM)	INDIKATOR CAPAIAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2024)	TARGET INDIKATOR					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	504 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	358 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	300 Orang	300 Orang	350 Orang
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	2.104 Lansia	150 Lansia	150 Lansia	150 Lansia	300 Orang	300 Orang	150 Lansia
4	Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	600 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	300 Orang	300 Orang	200 Orang
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial	456 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	300 Orang	300 Orang	450 Orang

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun anggaran 2025 telah merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih dan mengacu kepada program prioritas kepala daerah terpilih, guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi, tidak terlepas dari hasil Musrembang tingkat kota Bekasi dimana usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat kota Bekasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kota Bekasi, Berikut Rencana Kerja Dinas Sosial kota Bekasi.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
					SEBELUM	SESAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS SOSIAL					28.650.522.74 0,00	31.886.278.68 0,00	29.226.552.14 5,00	576.029.405,0 0		37.462.164.10 0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					28.650.522.74 0,00	31.886.278.68 0,00	29.226.552.14 5,00	576.029.405,0 0		37.462.164.10 0,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					28.650.522.74 0,00	31.886.278.68 0,00	29.226.552.14 5,00	576.029.405,0 0		37.462.164.10 0,00	
1,	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100 %	100 %	14.248.022.74 0,00	15.061.828.88 0,00	14.171.420.83 6,00	997.901.360,0 0		15.245.924.10 0,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan		4 Dokumen	100 %	19.000.000,00	19.000.000,00	27.727.000,00	8.727.000,00		50.000.000,00	DINAS SOSIAL

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		4 Laporan	4 Laporan	19.000.000,00	19.000.000,00	27.727.000,00	8.727.000,00		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		100 %	100 %	11.055.668.100,00	10.142.478.000,00	10.570.387.000,00	-	485.281.100,00		9.396.459.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		1036 Orang /bulan	1036 Orang /bulan	11.050.918.100,00	10.137.728.000,00	10.565.637.000,00	-	485.281.100,00		9.346.459.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		21 Laporan	20 Laporan	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100 %	100 %	310.999.000,00	310.999.000,00	53.900.000,00	-	257.099.000,00		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		77 Paket	77 Paket	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		30 Orang	0 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		79 Orang	0 Orang	187.099.000,00	187.099.000,00	0,00	-	187.099.000,00	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100 %	100 %	595.000.000,00	595.000.000,00	620.988.250,00	25.988.250,00		1.170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		250.000.000,00	DINAS SOSIAL

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>										
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	195.988.250,00	-4.011.750,00		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>										
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>										
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			25 Dokum en	25 Dokum en	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>										
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			30 Lapora n	12 Lapora n	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>										
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Lapora n	1 Lapora n	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>										
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0	0,00		100.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terpenuhinya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		100 %	100 %	400.000.000,0 0	400.000.000,0 0	153.250.000,0 0	- 246.750.000,0 0		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		10 Unit	16 Unit	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0	100.000.000,0 0	0,00		500.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		10 Unit	7 Unit	300.000.000,0 0	300.000.000,0 0	53.250.000,00	- 246.750.000,0 0		500.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100 %	100 %	863.276.640,0 0	2.590.272.880,00	1.741.089.586,00	877.812.946,0 0		2.454.465.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		24 Laporan	24 Laporan	468.000.000,0 0	468.000.000,0 0	468.000.000,0 0	0,00		175.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	12 Laporan	395.276.640,00	2.122.272.880,00	1.273.089.586,00	877.812.946,00		2.279.465.100,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>		100 %	100 %	1.004.079.000,00	1.004.079.000,00	1.004.079.000,00	0,00		775.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		6 Unit	6 Unit	230.080.000,00	230.080.000,00	230.080.000,00	0,00		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		10 Unit	13 Unit	249.769.000,00	249.769.000,00	249.769.000,00	0,00		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		85 Unit	85 Unit	124.230.000,00	124.230.000,00	124.230.000,00	0,00		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
2,	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial		100 %	100 %	4.524.850.000,00	4.524.850.000,00	3.341.258.639,00	-1.258.610.000,00		3.266.240.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>		1 Dokumen	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>		1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>		100 %	100 %	4.474.850.000,00	4.474.850.000,00	3.341.258.639,00	-1.133.591.361,00		3.166.240.000,00	DINAS SOSIAL

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		238 Orang	40 Orang	714.000.000,00	714.000.000,00	1.160.895.223,00	446.895.223,00		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		12 Orang	12 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	182.567.701,00	-17.432.299,00		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		376 Lembaga	8 Lembaga	3.560.850.000,00	3.560.850.000,00	1.997.795.715,00	-1.563.054.285,00		2.066.240.000,00	DINAS SOSIAL
3,	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat		100 %	100 %	4.402.800.000,00	4.402.800.000,00	4.645.554.625,00	5.447.200.000,00		9.850.000.000,00	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			rehabilitasi sosial dasar di luar panti										
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Terpenuhinya Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti</i>		100 %	100 %	4.377.800.000,00	4.377.800.000,00	4.645.554.625,00	267.754.625,00		9.800.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan												
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		1500 Orang	1100 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	743.400.000,00	-56.600.000,00		1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang												
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun</i>		750 Orang	209 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		350.000.000,00	DINAS SOSIAL	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Kewenangan Kabupaten/Kota</i>										
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu												
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		250 Orang	127 Orang	642.800.000,0 0	642.800.000,0 0	629.840.000,0 0	-12.960.000,00		2.500.000.000 ,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga												
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		350 Orang	350 Orang	390.000.000,0 0	390.000.000,0 0	589.000.000,0 0	199.000.000,0 0		700.000.000,0 0	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial												
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		250 Orang	318 Orang	195.000.000,0 0	195.000.000,0 0	358.380.000,0 0	163.380.000,0 0		700.000.000,0 0	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat												

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		450 Orang	504 Orang	1.250.000.000 ,00	1.250.000.000 ,00	1.380.000.000 ,00	130.000.000,0 0		1.500.000.000 ,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak											
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	32.633.625,00	-17.366.375,00		200.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		1.000.000.000 ,00	DINAS SOSIAL

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	450 Orang	450 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	51.081.000,00	-48.919.000,00		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	450 Orang	450 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	199.190.000,00	-50.810.000,00		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	450 Orang	450 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	12.030.000,00	-37.970.000,00		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	250 Orang	250 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00		250.000.000,00	DINAS SOSIAL

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Terpenuhinya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi</i>		100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>		1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
4,	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS		100 %	93 %	2.355.700.000,00	4.777.649.800,00	4.572.316.800,00	1.044.300.000,00		3.400.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terpenuhinya Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>		100 %	100 %	2.355.700.000,00	4.777.649.800,00	4.572.316.800,00	2.216.616.800,00		3.400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>		123271 5 Orang	932945 Orang	600.000.000,0 0	600.000.000,0 0	336.840.000,0 0	- 263.160.000,0 0		700.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>		1015 Keluar ga	32897 Keluar ga	476.000.000,0 0	476.000.000,0 0	745.770.000,0 0	269.770.000,0 0		900.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		500 Keluar ga	11410 Keluar ga	1.000.000.000 ,00	3.421.949.800 ,00	3.248.486.800 ,00	2.248.486.800, 00		1.000.000.000 ,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		100 Orang	30 Orang	279.700.000,0 0	279.700.000,0 0	241.220.000,0 0	-38.480.000,00		800.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
5,	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100 %	100 %	2.130.000.000 ,00	2.130.000.000 ,00	1.876.244.335 ,00	1.870.000.000, 00		4.000.000.000 ,00	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Terpenuhinya Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial</i>		100 %	100 %	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00	1.381.879.910,00	-98.120.090,00		2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan											
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		700 Orang	700 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	588.240.000,00	-11.760.000,00		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang											
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		350 Orang	350 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi											
		<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		6 Unit	2 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	241.253.910,00	-58.746.090,00		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan											

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		400 Orang	400 Orang	150.000.000,0 0	150.000.000,0 0	150.000.000,0 0	0,00		450.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial											
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		300 Orang	200 Orang	180.000.000,0 0	180.000.000,0 0	152.386.000,0 0	-27.614.000,00		350.000.000,0 0	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>		100 %	100 %	650.000.000,0 0	650.000.000,0 0	494.364.425,0 0	- 155.635.575,0 0		1.400.000.000 ,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana											
			<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		3 Kampung	2 Kampung	400.000.000,0 0	400.000.000,0 0	356.572.000,0 0	-43.428.000,00		900.000.000,0 0	DINAS SOSIAL

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana											
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		65 Orang	65 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	137.792.425,00	-112.207.575,00		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
6,	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		100 %	1 Area	989.150.000,00	989.150.000,00	619.756.910,00	710.850.000,00		1.700.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional</i>		100 %	100 %	989.150.000,00	989.150.000,00	619.756.910,00	-369.393.090,00		1.700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>		2 Dokumen	2 Dokumen	273.800.000,00	273.800.000,00	244.406.910,00	-29.393.090,00		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>		248 Makam	248 Makam	565.350.000,00	565.350.000,00	375.350.000,00	- 190.000.000,00		800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>		12 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	- 150.000.000,00		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
J U M L A H							28.650.522.740,00	31.886.278.680,00	29.226.552.145,00	791.848.027.076,00		37.462.164.100,00	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025, adalah merupakan awal pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 -2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025. Renja Tahun 2025 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Bekasi.

Kaidah Pelaksanaan Umum

Sehubungan dengan implementasi Renja Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Sosial berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Sosial berkewajiban menyusun Renja Dinas Sosial Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Sosial dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renja, Dinas Sosial Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan rencana kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan diperlukan koordinasi, integritas dan sinkronisasi antara satuan kerja perangkat

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- daerah, instransi vertikal di daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah, DPRD serta seluruh komponen masyarakat Kota Bekasi.
2. Seluruh Pegawai Dinas Sosial berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan yang tertuang dalam renja Dinas Sosial tahun 2025.
 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja sesuai dengan tupoksi dan melakukan koreksi yang diperlukan serta hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota.
 4. Pada akhir tahun anggaran 2025, wajib melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2025 dan dilaporkan kepada Wali Kota

Bekasi,

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI**

Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si.
NIP. 19660301 199003 1 010

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	